

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Aksesibilitas Lembaga *Think Tank* Dalam Upaya Pengarusutamaan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta

¹Nurpini Sulistya, Gerry Katon Mahendra*²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

²Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Email: ^{1*}gerrykaton@unisayogya.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 02/01/2023

Received in revised form 08/02/2023

Accepted 08/02/2023

Abstract

Gender inequality is one of the strategic issues in Special Region of Yogyakarta (DIY), with a variety of social and characteristics. Violence is one of the many issues that arise, especially among women. This is evidenced by the high rate of domestic violence in DIY community groups. The government has made several efforts; one of which is the Gender Corner. However, the government's efforts have not produced the desired results. The research hypothesis is that think tank organizations can optimize the government's strategic plan using the Gender Mainstreaming strategy. The research was descriptive qualitative, with data collected through in-depth interviews and documentation. The subject of the investigation was a DIY think tank, namely CV. Multi License and PT. Synergy. Both institutions had become gender mainstreaming strategy implementation experts. The study concentrated on four points of accessibility of think tanks in PUG efforts: access, participation, control, and benefits. As a result, except for the benefit points, the institution's accessibility to these four important points is found to be quite good. Think tanks are said to have good access, participation, and control in the implementation of Gender Mainstreaming in DIY region, with data transparency to the provision of facilities by the government. However, the benefits have yet to be realized, as gender equality in the DIY sector has not yet been achieved. As a result, the study advises various stakeholders, including think tanks and the government, to ramp up the PUG agenda. Additional activities such as socialization, mentoring, and briefing are also required.

Keywords: Accessibility, Think tank, Gender Mainstreaming

Abstrak

Ketimpangan gender menjadi salah satu isu strategis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan berbagai keberagaman karakteristik dan sosial. Berbagai macam bentuk isu yang muncul meliputi kekerasan, yang mana seringkali terjadi pada perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di kelompok masyarakat DIY. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah, dimana salah satunya adalah Gender Corner. Meskipun demikian, upaya pemerintah tidak berbuah hasil yang optimal. Dengan ini, hipotesis dari penelitian yakni bahwasanya organisasi *think tank* mampu mengoptimalkan rencana strategis pemerintah dengan strategi PUG (Pengarutamaan Gender). Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengambilan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Obyek penelitian merupakan lembaga *think tank* di DIY yaitu CV. Multi Lisensi dan PT. Sinergi. Kedua lembaga tersebut telah menjadi pakar terhadap implementasi strategi PUG. Penelitian berfokus pada empat poin aksesibilitas lembaga *think tank* dalam upaya PUG yang meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Sebagai hasilnya, didapatkan bahwa aksesibilitas lembaga terhadap keempat poin penting tersebut dapat dikatakan cukup baik terkecuali pada poin manfaat. Akses, partisipasi, dan kontrol dalam pelaksanaan PUG di daerah DIY oleh lembaga *think tank* dikatakan baik dengan adanya transparansi data hingga penyediaan fasilitas oleh pemerintah. Meskipun demikian, manfaatnya masih belum terwujud, dimana kesetaraan gender masih belum tercapai di wilayah DIY. Dengan demikian, penelitian merekomendasikan kepada berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga *think tank* sekaligus pemerintah untuk mengencangkan kembali agenda PUG. Berbagai kegiatan tambahan pun diperlukan mencakup sosialisasi, pendampingan, hingga pengarahan.

Kata kunci: Gender, Lembaga *Think tank*, Perempuan, Yogyakarta

^{*)}Penulis Korespondensi

E-mail : gerrykaton@unisayogya.ac.id

PENDAHULUAN

Berbagai macam topik atau isu yang berkaitan dengan gender saat ini cukup banyak dijadikan diskursus oleh publik, namun konsep nya seringkali tidak dipahami secara memadai. Istilah gender bukan sekedar sebagai persoalan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, bahkan lebih luas daripada itu. Gender berkaitan dengan pola pikir (*mindset*), perspektif dan cara pandang (Surabaya, 2022). Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, Implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang harus menjadi dasar setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. (Purwatiningsih et al., 2020).

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan yang secara spesifik menuangkan 26 program responsif gender yang meluas pada beragam bidang, paradigma pembangunan Indonesia mengalami sebuah pergeseran penting ke arah pembangunan yang meletakkan kesetaraan gender pada intinya (*mainstream*). Namun demikian, pergeseran paradigma tersebut tidak serta merta menyelesaikan permasalahan inti dari relasi laki-laki dan perempuan, yakni ketimpangan gender. Hal ini dikarenakan pemahaman konsep dan praktis dari PUG sendiri masih beragam. Pengambil keputusan dan masyarakat masih cenderung mendefinisikan PUG sebagai program-program yang terkait perempuan semata.

Pengarutamaan Gender pada dasarnya adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan isu ketidakadilan gender (Munir, 2019). PUG dimaknai sebagai konsep,

prinsip, dan problematika kesetaraan gender yang diintegrasikan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada semua tahap manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (Afni et al., 2022). Namun, pada kenyataannya berbagai kebijakan yang pro gender belum optimal dilaksanakan. Implementasinya seringkali hanya menggeser diskriminasi dari ranah domestik ke ranah publik (Parahikma, 2019) dan bahkan menjadi bentuk eksploitasi baru dan beban ganda terhadap perempuan (Putra et al., 2021).

Ketimpangan gender menjadi salah satu isu strategis DIY dengan berbagai keberagaman karakteristik dan sosial. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi perempuan dan laki-laki, sehingga memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, control atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Esariti et al., 2020). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak berinovasi membentuk "Gender Corner" ini sebagai media untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di DIY.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya kekerasan terjadi pada perempuan dikalangan masyarakat dan rendahnya tingkat perekonomian suatu keluarga . Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja, termasuk masalah KDRT merupakan fenomena yang masih terjadi di masyarakat DIY. Hal ini tidak lain penyebabnya adalah akibat tingkat ekonomi yang rendah dalam suatu keluarga. Pemerintah DIY berkewajiban untuk mencegah dan terus mengurangi kejadian-kejadian kekerasan tersebut. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah bisa memberikan pelayanan atau respon terhadap potensi munculnya gejala-gejala tersebut di antaranya dengan mendekatkan layanan masyarakat. Gender Corner untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Dengan mendekatkan layanan modeling diharapkan kasus kekerasan di DIY bisa ditekan dan bisa dicegah. Namun permasalahan utama masih banyak ketimpangan atau ketidakadilan terjadi terhadap perempuan karena perempuan selalu dianggap mahluk yang lemah. (Kompas, 2021) Berikut data tabel jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kelompok umur:

Tabel 1. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	0 sd 17 tahun					
	Laki-laki	152	14	139	143	57
	Perempuan	326	34	302	275	173
2	18 sd 25 tahun					
	Laki-laki	8	2	14	10	2
	Perempuan	268	46	221	273	131
3	25 tahun ke atas					
	Laki-laki	43	7	17	20	7
	Perempuan	818	118	573	514	232
4	Total					
	Laki-laki	203	23	170	173	66
	Perempuan	1.412	198	1.096	1.062	536

Sumber: Sistem Informasi Gender & Anak, 2021.

Dapat di lihat tabel diatas, menunjukkan jumlah korban kekerasan perempuan dan anak menurut kelompok umur bahwa di umur 0 sd 17 sampai 25 tahun keatas dari tahun 2018-2022 menunjukkan bahwayang lebih banyak yang mendapatkan kekerasan adalah kelompok perempuan dibanding laki-laki. Data ditahun 2022 belum terakumulasi semuanya, karena belum memasuki tahun 2023 (SIGA, 2021). Pembentukan Gender Corner ini tidak dapat dipungkiri melibatkan tidak hanya dinas terkait. Namun juga Lembaga-lembaga lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan program inovasi yang dibuat, salah satunya peran Lembaga *think tank*.

Definisi awal terhadap *Think tank* menyebutkan ia sebagai organisasi penelitian non-pemerintah, nirlaba dengan otonomi organisasi yang substansial dari pemerintah dan dari kepentingan masyarakat seperti perusahaan, kelompok kepentingan dan partai politik. Seiring berjalannya waktu, definisi, bentuk organisasi dan tindakan *think tank* semakin berkembang. Definisi *think tank* tidak lagi harus berbentuk nirlaba, tetapi lebih dijabarkan menurut fungsi dan bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan untuk memengaruhi proses penyusunan kebijakan (Pautz, 2011). *Think tank* sering bertindak sebagai jembatan antara akademisi dan aktor kebijakan dan antara negara dengan masyarakat sipil melayani kepentingan publik sebagai suara independen yang menerjemahkan penelitian dasar ke dalam narasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimengerti, diaplikasikan, dan diakses untuk pembuat kebijakan dan publik (Mcgann, 2020).

Hubungan kerja *think tank* dengan pemerintah dan non pemerintah menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang inklusif, berkesinambungan, berbasis bukti, serta membangun *peer review culture* sebagai salah satu pilar infrastruktur kemajuan bangsa. Lembaga pemerintah memiliki kapasitas untuk melakukan riset yang berorientasi pada perubahan kebijakan. Banyak naskah akademik yang dihasilkan, termasuk naskah kajian kebijakan dan usulan kebijakan singkat (Knowledge sector Initiative, 2021). Dalam proses kebijakan, lembaga ini tidak hanya mendapatkan legitimasinya dari kapasitas akademik sebagai penyedia ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam kebijakan, namun juga membawa manfaat demokratik (Christensen & Holst, 2020) melalui penggunaan ragam nilai dan perspektif dari berbagai kepentingan. Jika tidak, maka yang terjadi adalah defisit demokratik (Shaw, et. Al., 2015) dalam upaya lembaga *think tank* berperan merumuskan kebijakan publik.

Dalam menjalankan perannya, Lembaga *think tank* memiliki batasan-batasan. Medvetz menarasikan bagaimana peran Lembaga ini terbatas dengan bersumber dari internal Lembaga itu sendiri (Keudel & Carbou, 2021). Medvetz menemukan, sebagai Lembaga yang otonom, Lembaga *think tank* memutuskan dimana pasar, media dan aktivitas mereka akan dilakukan dan kapan dimulai serta diakhirinya kegiatan tersebut. Ini dapat menjadi batasan bagi aksesibilitas secara penuh dalam peran politik kebijakan yang mereka lakukan.

Dalam masa krisis kebijakan, lembaga *think tank* justru mendapatkan kesempatan untuk melibatkan lebih banyak sumberdaya manusia yakni akademisi yang memegang menjadi bahan bakar bagi kegiatan analisis yang dilakukan selain menjadi kesempatan bagi lembaga untuk mendapatkan dukungan dana dan jejaring yang lebih luas sebagai implikasi dari dibutuhkannya keahliannya mereka dalam melihat permasalahan kebijakan (Coman, 2018).

CV Multi Lisensi adalah salah satu Lembaga yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai Lembaga *think tank*. Lembaga ini merupakan mitra instansi daerah untuk menyusun kajian akademik yang mengikuti proses penyusunan kebijakan.

Aksesibilitas CV Multi Lisensi dalam penyusunan Naskah Akademik diwadhahi dalam sebuah tim teknis. CV Multi Lisensi mempunyai tim penyusun naskah akademik yang dibutuhkan oleh instansi, Sekretaris Dewan sebagai user dan kemudian diwadhahi dalam tim teknis. Untuk proses penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah, Lembaga ini butuh pembahasan sektoral. Namun demikian, instansi daerah tidak sepenuhnya terbuka terhadap data yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Lembaga *think tank* untuk Menyusun produk gagasan yang diminta. Kendala dalam hal penyusunan Naskah Akademik adalah tim teknis yang berubah-ubah itulah yang menjadi masalah utama. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai aksesibilitas lembaga *think tank* dengan kasus upaya pengarusutamaan gender di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau masalah yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian tersebut (Burhan Bungin, 2015). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan meneliti kasus empirik CV Multi Lisensi dalam berperan sebagai Lembaga *think tank* dalam program pengarusutamaan gender di DIY. Analisis terhadap data yang diperoleh ditujukan untuk mendeskriptifkan mengenai aksesibilitas lembaga *think tank* yaitu CV Multi Lisensi upaya dalam Pengarusutamaan Gender. Untuk menggambarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap anggota atau karyawan dengan berbagai tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga yang berkontribusi sebagai *think tank* program pengarusutamaan gender di DIY yakni Kepala Seksi, Direktur Keuangan dan beberapa orang staf, serta dari pihak user atau pemerintah daerah. Selain itu peneliti melakukan Teknik triangulasi dengan menelaah dokumen Lembaga dan instansi daerah yang terkait.

HASIL DAN ANALISIS

Aksesibilitas Lembaga Think Tank Dalam Upaya Pengarusutamaan Gender di DIY

Menurut indikator peneliti gunakan terdapat beberapa indikator, yaitu Akses, *Accuracy* (Akurat), *Timely* (Tepat Waktu), *Relevant* (Relevan), *Complete* (Lengkap) dan Partisipasi, dengan hal ini maka peneliti akan menguraikan berdasarkan keenam poin tersebut:

a. Akses

Menurut teori Hasny akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat. Mudahnya mengakses informasi memberikan banyak manfaat bagi manusia. Tapi sisi lain, akses informasi yang begitu luas ini juga menjadi penyebab konflik diberbagai tempat. Jika kita bertanya pada Al-Qur'an, bagaimana cara kita menghadapi informasi yang begitu luas ini? Maka kita akan temukan firman Allah swt, "Wahai orang-orang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." (Al-Hujurat 6).

Pada poin ini dapat dijelaskan bahwa akses adalah yang menyangkut akan data/informasi dalam akses terhadap pengarusutamaan gender. Tidak adanya suatu akses maka akan terhambatnya yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender.

Dapat dilihat melalui beberapa data dan informasi mengenai pengarusutamaan gender sudah memiliki akses yang sangat mudah dan sangat membantu untuk beberapa pihak karena dapat diakses melalui web-web dan tersedia untuk umum. Salah satu cara mengetahui hal ini terealisasikan atau belum maka dapat dilihat dari bagaimana lembaga-lembaga dapat mengakses informasi, kemudian dilihat lagi apakah dengan adanya pengarusutamaan gender selama ini memiliki hasil yang sesuai dengan kebutuhan lembaga think tank dan masyarakat dalam mencapai akses-akses yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender di DIY. CV Multi Lisensi mengkaji tentang PUG yang salah satu masalah gendernya yaitu kelompok rentan dan pendidikan khusus ditekankan lagi di PUG arahnya adalah semua elemen tersebut mereka coba untuk merangkul agar bisa meningkatkan produktivitasnya bagaimana caranya semua elemen itu bisa ditingkatkan produktivitasnya baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya PT. Sinergi pernah mengkaji masalah gender tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan juga melakukan kajian tentang rencana aksi daerah penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Hasil wawancara yang didapatkan melalui beberapa informan menunjukkan bahwa adanya hasil yang cukup baik dan memenuhi indikator akses dan lembaga think tank juga merasakan dampaknya karena akses dari pemerintah sudah sangat terbuka. Serta dijelaskan juga mengenai kajian yang dilakukan oleh lembaga think tank tersebut.

b. Accuracy (Akurat)

Menurut teori Tata Sutabri, akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Indikator ini merupakan sebuah keakuratan dalam informasi yang diperlukan oleh lembaga think tank maupun pemerintah dalam melengkapi pengarusutamaan gender. Jika data/informasi yang diminta tidak akurat maka tidak bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Lembaga think tank dan pemerintah sangat mementingkan keakuratan data maupun informasi yang mengenai pengarusutamaan gender agar tercapainya sebuah keputusan. Dalam pengarusutamaan gender terkait beberapa instansi mengenai keakuratan data yang diinginkan mungkin masih ada beberapa yang bisa dikatakan tidak sesuai tetapi dalam artian tidak memenuhi target tapi sebetulnya sudah jauh lebih baik data yang didapatkan. Hasil wawancara yang didapatkan melalui beberapa informan menunjukkan bahwa adanya hasil yang sudah baik dalam memenuhi indikator akurat dan lembaga serta instansi lain juga sudah merasakan kemudahan tersebut.

c. Timely (Tepat Waktu)

Menurut teori Tata Sutabri, Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. Indikator tepat waktu yaitu mengarah pada data/informasi yang diperlukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah dijadwalkan. Kendala yang dihadapi adalah jadwal yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati namun data/informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, lembaga think tank dan instansi lain sudah bisa dibilang baik namun ada beberapa data yang lumayan membutuhkan waktu untuk mengolah sehingga sesuai dengan permintaan itu yang menjadikannya lama seperti data yang belum terpilah berdasarkan jenis kelamin itulah yang membutuhkan waktu lama. Serta jika yang bersangkutan tersebut adanya kesibukan diinternal dinas maupun lembaga think tank namun tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Dengan diadakannya penjadwalan waktu maka pemerintah, dinas dan lembaga think tank dapat menyusun pengarusutamaan dengan waktu yang tepat dan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

d. Relevant (Relevan)

Menurut teori Tata Sutabri, relevan adalah informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi. Indikator ini diambil oleh peneliti yaitu untuk salah satu cara untuk mengukur sejauhmana informasi tersebut dapat dikatakan relevan untuk data maupun informasi mengenai pengarusutamaan gender. Hasil dari wawancara yang sudah peneliti lakukan yaitu mewawancarai informan tersebut dan sudah cukup baik, dimana data/informasi tersebut sudah relevan dan tidak pernah menjumpai data yang tidak relevan hanya saja jika berhubungan dengan stekholder lain seperti melibatkan aktor lain itu membuat kita yang membutuhkan memakan waktu yang agak lama namun tidak pernah mendapatkan data yang tidak relevan.

e. Complete (Lengkap)

Informasi harus diberikan secara lengkap. Indikator ini merupakan kelengkapan data/informasi tersebut untuk mencukupi kelengkapan data. Salah satu untuk mengukur melihat sejauhmana informasi tersebut serta mencukupi data yang dibuat untuk pengarusutamaan gender. Data yang diberikan oleh dinas pun sudah mencukupi hanya saja ada sedikit kendala ketika kita membutuhkan data ditahun 2022 sedangkan data yang ada adalah ditahun sebelumnya karena mereka belum siap atau memang sistem datanya tersebut adalah data 1 tahun sebelumnya data tersebut yang kita jadikan acuan dalam melengkapi pendataan yang kita butuhkan. Seperti data mengenai pengentasan kemiskinan DIY angka garis kemiskinannya menunjukkan sebanyak RP. 482.855,00. Jumlah penduduk DIY sebanyak 3.322.727 jiwa, persentase penduduk miskin 12,80% periode 2021 dan jumlah penduduk miskin DIY 506.450 jiwa. Berdasarkan data pada di atas, dapat mengetahui bahwa data tersebut untuk tahun 2022 belum terakumulasi hanya sampai tahun 2021. Kendala yang dihadapi oleh informan karena data tersebut masih belum siap sehingga sebagai acuan data yang dibutuhkan adalah ditahun sebelumnya.

f. Partisipasi

Partisipasi adalah perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Indikator penulis ambil dari partisipasi, yang dimana masyarakat dilibatkan didalam berbagai lembaga yang bersangkutan, yang artinya beberapa yang bersangkutan ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan cara ini maka kepentingan mereka tidak terabaikan. Dalam penelitian pada poin partisipasi ini dapat dilihat dari bagaimana pengarusutamaan gender ini memberikan dampak pada peningkatan keikutsertaan masyarakat serta lembaga think tank dalam pengarusutamaan gender yang diberikan oleh pemerintah dan apakah dengan adanya pengarusutamaan gender dapat memberikan dampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga think tank dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka menyatakan bahwa dalam proses pengarusutamaan gender ini masih ada beberapa yang kurang baik serta ada yang mengatakan juga sudah baik berdasarkan yang informan sebutkan. Dapat dilihat dari keseluruhan penelitian diatas dapat menunjukkan bahwa aksesibilitas lembaga think tank dalam upaya pengarusutamaan gender di DIY semuanya sudah cukup optimal dan sudah sangat baik walaupun ada beberapa kendala kecil, namun bukan berarti tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari wawancara diatas menunjukkan sedikit perubahan untuk lembaga *think tank* dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di DIY, meskipun masih banyak masyarakat yang masih awam mengenai pengarusutamaan gender tetapi dengan adanya pengarusutamaan gender ini dapat mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan

dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan dan menganalisa data yang telah terkumpul serta menjelaskan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas pada poin “akses” bisa dikatakan sudah cukup baik, artinya strategi PUG yang diberikan oleh pemerintah sudah dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan akses dalam pengambilan data mengenai data/informasi PUG.
2. Aksesibilitas pada poin “accuracy/akurat” sudah bisa dikatakan sangat baik, artinya pada data/informasi yang dibutuhkan memang sudah akurat sehingga dapat memberikan data tersebut kepada pemerintah, dinas, lembaga, serta instansi lain dengan keakuratan data mengenai PUG.
3. Aksesibilitas pada poin “timely/tepat waktu” bisa dikatakan cukup baik, artinya pada data/informasi yang diberikan telah sesuai dengan waktu yang diputuskan sehingga tidak ada yang melewati tenggat waktu yang telah ditentukan. Keuntungan bagi pemerintah, dinas, lembaga yang terkait karena bisa menginput data PUG tepat waktu.
4. Aksesibilitas pada poin “relevan” bisa dikatakan cukup baik, artinya dalam pengarusutamaan gender data/informasi mengenai gender itu sudah sangat relevan sehingga dapat memberikan hasil itu sendiri kepada yang membutuhkan.
5. Aksesibilitas pada poin “complete/lengkap” bisa dikatakan cukup baik, artinya dalam melengkapi data pengarusutamaan gender itu sudah mencukupi kelengkapan data yang dibutuhkan namun masih terdapat kendala yang menyebabkan hal ini belum terlalu optimal bagi beberapa dinas maupun lembaga think tank tersebut.
6. Aksesibilitas pada poin “partisipasi” bisa dikatakan cukup baik, artinya partisipasi dalam lembaga think tank dalam upaya PUG ini sudah terbilang mendapatkan hasil/manfaat itu sendiri kepada lembaga serta masyarakat dalam membantu pengarusutamaan gender agar bisa terangkat kesetaraan gender dan bisa terwujud sehingga tidak ada lagi kesenjangan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang diberikan Sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender agar merata disetiap sektor dimulai dari lingkup yang kecil sampai ke lingkup yang besar.
2. Dinas yang membidangi PUG di DIY, sebaiknya memperbanyak kegiatan maupun program yang mendukung PUG tapi dalam membuat program dan kegiatan tersebut harus berbasis data.
3. Melakukan sosialisasi pentingnya PUG agar bertujuan untuk mengenalkan serta memberi pemahaman guna dan tujuan PUG.
4. Partisipasi masyarakat perlu dan ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
5. Seluruh data yang dihasilkan oleh instansi baik itu level paling bawah sampai paling atas itu harus terpilah berdasarkan jenis kelamin agar bisa melakukan analisis kondisi laki-laki dan perempuan disemua sector itu penting untuk implementasi PUG.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N., Rezal, M., & Latoki, L. (2022). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(1), 19–48. <https://doi.org/10.24239/msw.v14i1.980>
- Burhan Bungin. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Managemen, dan Pemasaran*. Penerbit Kencana.
- Christensen, J; Holst, C. (2020). *How Do Advocacy Think Tanks Relate to Academic Knowledge? The Case of Norway. Scandinavian Political Studies*, 43(3), 223–239. doi:10.1111/1467-9477.12184
- Coman, R. (2018): Why and how do think tanks expand their networks in times of crisis? The case of Bruegel and the Centre for European Policy Studies, *Journal of European Public Policy*, DOI: 10.1080/13501763.2017.1415953.
- Esariti, L., Fauziah, F., & Artiningsih, A. (2020). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hunian pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Semarang. *Jurnal Permukiman*, 15(2), 107. <https://doi.org/10.31815/jp.2020.15.107-116>
- Kompas. (2021). Mendikbudristek: Ada 2.500 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/12/164029771/mendikbudristek-ada-2500-kasus-kekerasan-pada-perempuan-di-2021>.
- Keudel, O., & Carbou, O. (2021). Think tanks in a limited access order: The case of Ukraine. *East European Politics and Societies*, 35(3), 790-811.
- Knowledge sector Initiative. (2021). Tingkatkan Kolaborasi *Think tank* Pemerintah dan Non Pemerintah: BRIN Eksplorasi Mekanisme Proses Bisnis.
- McGann, James G., "2019 Global Go To Think Tank Index Report" (2020). TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. 17. https://repository.upenn.edu/think_tanks/17
- Parahikma, I. (2019). An Nisa ' *Jurnal Studi Gender dan Anak Pengembangan Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Kecerdasan Musikal*. 12(1), 636–642.
- Pautz, H. (2011). Revisiting the think-tank phenomenon. *Public policy and administration*, 26(4), 419-435.
- Purwatiningsih, S., Setianingrum, T., Kartika, D., Muhammad, E., & Sari, R. (2020). Data Pilah Gender / Data Pembuka Wawasan Kota Yogyakarta 2020.
- Putra, G., Yayuk, A., & Rahayu, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia. 15(1), 206–216.
- Sahrul, S., & Munir, U. (2020). Pengarus utamaan gender terhadap perempuan dan anak serta upaya penerapannya dalam masyarakat di desa bentek kecamatan gangga kabupaten lombok utara. *SINERGI: JURNAL PENGABDIAN*, 2(1).
- SIGA. (2021). *Sistem Informasi Gender & Anak*.
- Shaw, S. E.; Russell, J; Parsons, W; Greenhalgh, T. (2015). *The view from nowhere? How think tanks work to shape health policy. Critical Policy Studies*, 9(1), 58–77. doi:10.1080/19460171.2014.964278
- Surabaya, D. I. K. (2022). Belajar dari yang terbaik: evaluasi pengarusutamaan gender

di kota surabaya, indonesia. 48(1),
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2556>

127-140.